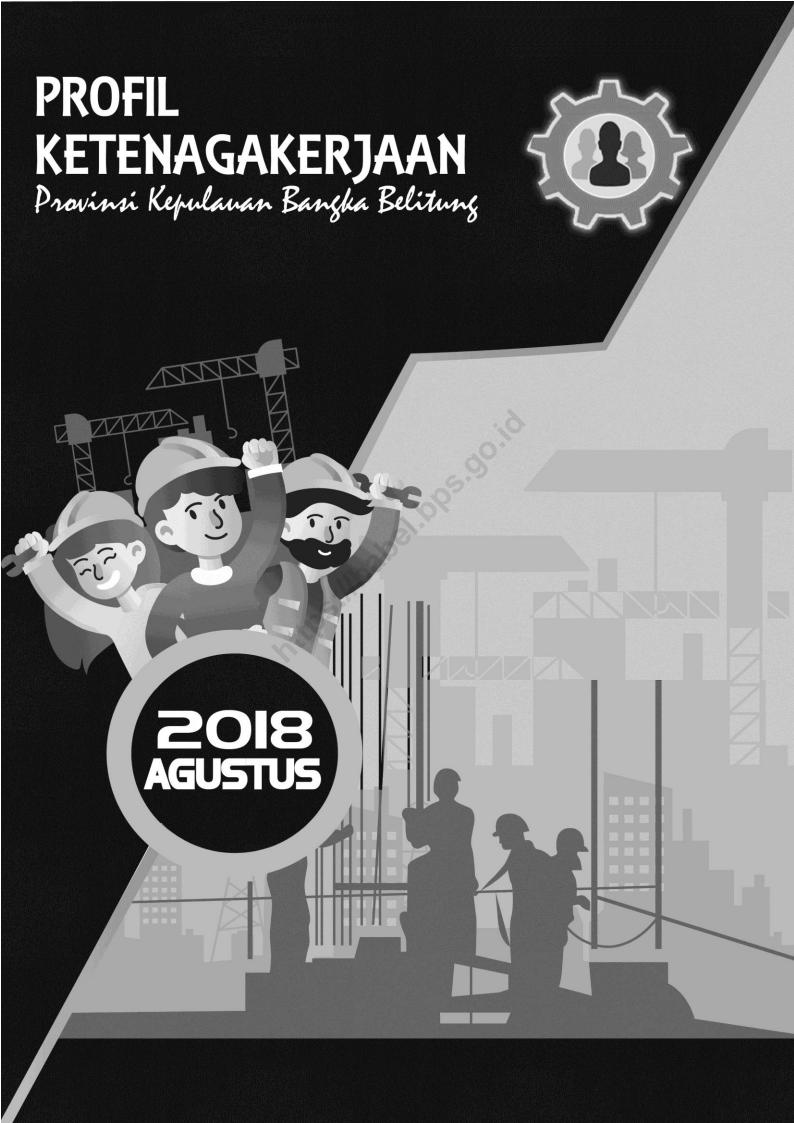
Katalog: 2303003.19

PROFIL KETENAGAKERJAAN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung









PROFIL KETENAGAKERJAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG AGUSTUS 2018

ISBN:

Nomor Publikasi: 19520.1801

Katalog BPS: 2303003

Ukuran Buku: 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman: x + 34 halaman

Naskah:

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Gambar Kulit:

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

nitips://pabel.pps.go.id

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Darwis Sitorus, S.Si, M.Si

Editor : Harjo Teguh Ilmiana, S.Si, MM

Drs. Agusman Simbolon, MAB

Aja Nasrun, SST, M.Sc

Desiana Arbani Safari, SST, MAP

Penulis : Sohidin, SST

Femmy Ristia, SST

Nur Jannah Mega Anindiata, SST

Uluan Raja Sitorus, SST

Gambar Kulit : Sohidin, SST

nitips://pabel.pps.go.id

KATA PENGANTAR

Informasi yang lengkap dan terpercaya mengenai kondisi ketenagakerjaan menjadi salah satu informasi yang dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan yang berkesinambungan. Dengan adanya data dan informasi tentang tenaga kerja yang berkesinambungan dapat menjadi suatu acuan dalam menentukan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Publikasi Profil Ketengakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Agustus Tahun 2018, merupakan salah satu upaya untuk menyediakan informasi di bidang ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Publikasi ini bersumber dari data Sakernas Agustus Tahun 2018 dan dikemas sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam melihat gambaran umum tentang kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan publikasi ini disampaikan terima kasih. Kami mengharapkan saran dan masukan dari pengguna publikasi untuk perbaikan edisi berikutnya.

Pangkalpinang, April 2019 Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Darwis Sitorus, S.Si, M.Si

nitips://pabel.pps.go.id

DAFTAR ISI

		Hala	man
Kat	a Penga	antar	v
Daf	tar Isi .		vii
Daf	tar Tab	el	viii
Daf	tar Gan	nbar	ix
Bab	I. Pen	dahuluan	1
1.1	Latar	Belakang	3
1.2	Maks	ud dan Tujuan	4
1.3	Ruan	g Lingkup Penulisan	4
1.4	Sister	natika Penyajian	5
1.5	Meto	de Survei	5
	1.5.1	Ruang Lingkup Survei	5
	1.5.2	Kerangka Sampel Survei	5
	1.5.3	Rancangan Sampel	6
	1.5.4	Metode Pengumpulan Data	6
	1.5.5	Pengolahan Data	6
1.6	Kons	ep dan Definisi	7
Bab	II. Ana	llisis Ketenagakerjaan	13
2.1	Karakt	eristik Penduduk Usia Kerja	15
	2.1.1 T	ingkat Partisipasi Angkatan Kerja	18
2.2	Pendic	likan Pekerja	19
2.3	Kontri	busi Sektor	22
2.4	Tenaga	a Kerja Menurut Status Pekerjaan	25
2.5	Pengai	ngguran	27
	2.5.1 I	Penganguran Terbuka	27
	2.5.2 I	Penganguran Terdidik	28
	2.5.3	Setengah Pengangguran	29
Dak	III D:-	aglzagan	21

DAFTAR TABEL

	Hala	ıman
Tabel 1.	Batasan Kegiatan Informal	12
Tabel 2.	Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Utama, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2018	17
Tabel 3.	Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2018	21
Tabel 4.	Distribusi Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2018	24
Tabel 5.	Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2018	26
Tabel 6.	Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2018	29

hitles: Illoabel Lopes. 90 ild



SAKERNAS AGUSTUS 2018



Survei Angkatan Kerja Naional



Definisi

Survei yang dilaksanakan oleh BPS yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang menggambarkan ketenagakerjaan.



Tujuan

Menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan



Waktu Pencacahan

8-31 Agustus 2018



Jumlah Sampel

2.400 Rumah Tangga



Data yang Dikumpulkan

Partisipasi sekolah, tingkat pendidikan, kegiatan seminggu yang lalu, pekerjaan utama, dan pekerjaan tambahan



Indikator yang Dihasilkan

Penduduk Usia Kerja (PUK), Angkatan Kerja (AK), Bukan Angkatan Kerja (BAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

"Dengan data Sakernas, kita wujudkan tenaga kerja yang optimal dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua"

hitles: Illoabel Lopes. 90 ild

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan data dan informasi yang akurat serta terpercaya dalam perencanaan pembangunan daerah sudah dirasakan sejak lama, salah satunya data mengenai ketenagakerjaan. Data ketenagakerjaan merupakan data yang penting bagi para pengambil kebijakan baik secara nasional maupun daerah terkait upaya program pembangunan nasional secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan khususnya di bidang ketenagakerjaan dapat dilihat melalui beberapa faktor pendekatan antara lain aspek penciptaan lapangan pekerjaan baru.

Tersedianya lapangan pekerjaan baru dapat membuka peluang pekerjaan dan menambah kesempatan kerja, yang secara tidak langsung diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan. Dengan semakin bertambahnya tenaga kerja yang terserap, diharapkan mampu mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan sehingga terwujudnya kesejahteraan penduduk di suatu wilayah.

Penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja merupakan modal pembangunan, meskipun sekaligus dapat pula menjadi beban dalam pembangunan tergantung dari potensi dan penggunaannya. Secara umum permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adalah tingginya laju angkatan kerja, rendahnya mutu tenaga kerja dan rendahnya laju kesempatan kerja yang tersedia. Tingginya laju angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan laju penciptaan lapangan kerja akan mengakibatkan timbulnya banyak pengangguran, dan mutu tenaga kerja yang rendah akan mempersulit penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada rendahnya penghasilan.

Data ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh para pengguna data dapat berupa data mentah atau data yang telah diolah menjadi informasi yang lebih bermakna. Penyajian data dapat dilakukan melalui tabel atau grafik yang ditambah dengan ulasan atau analisis deskriptif serta dirangkum dalam suatu buku atau media diseminasi data yang lain. Dengan penyajian data seperti ini, diharapkan pengguna data akan lebih mudah untuk memahami kondisi dan fenomena ketenagakerjaan yang terjadi. Publikasi "Profil Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Agustus Tahun 2018" ini merupakan kelanjutan dari publikasi yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Publikasi ini menyajikan berbagai analisis deskriptif dari data yang telah dikumpulkan dari Sakernas Agustus 2018.

Pengumpulan data ketenagakerjaan ini dilaksanakan melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), yang merupakan survei khusus yang dirancang untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan

oleh Badan Pusat Statistik tidak pernah berubah sejak 1976, kecuali untuk konsep penggangguran terbuka dan status pekerjaan, mulai tahun 2001 mengalami perluasan.

Pada tahun 2011-2013, BPS melakukan pengumpulan data tentang ketenagakerjaan sebanyak empat kali (triwulanan) setiap tahunnya, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November, setelah sebelumnya pada tahun 2007-2010, BPS melakukan pendataan Sakernas sebanyak dua kali setiap tahun yakni bulan Februari dan Agustus. Kemudian pada tahun 2014, Badan Pusat Statistik (BPS) kembali melakukan pengumpulan data tentang ketenagakerjaan secara semesteran atau dua kali dalam setahun yakni bulan Februari dan Agustus. Pengumpulan data di bulan Februari dirancang untuk mendapatkan estimasi indikator dan keadaan ketenagakerjaan pada level provinsi, sedangkan di bulan Agustus dirancang untuk mendapatkan estimasi indikator dan keadaan ketenagakerjaan hingga level kabupaten/kota. Mulai tahun 2016, kuesioner Sakernas sudah mengadopsi 2 konsep baku ketenagakerjaan dari ICLS ke-13 dan ICLS ke-19 meskipun konsep ICLS ke-19 belum diakomodir secara utuh. Kondisi metodologi ini berlaku hingga Sakernas tahun 2018.

Pada publikasi ini, data yang digunakan adalah data Sakernas Agustus tahun 2018 dengan analisis hingga level kabupaten/kota. Untuk memudahkan pembaca, publikasi ini juga dilengkapi dengan definisi operasional yang digunakan dalam pengumpulan data dan metodologi pengumpulan data pada Sakernas Agustus 2018.

1.2 Maksud dan Tujuan

Tujuan penulisan publikasi "Profil Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Agustus Tahun 2018" adalah untuk memberikan informasi kepada para pengguna data di bidang ketenagakerjaan yang bersumber dari data hasil Sakernas Agustus 2018. Diharapkan analisis ketenagakerjaan ini mampu memberikan informasi yang lebih jelas dan akurat bagi para pengambil kebijakan dalam menyusun perencanaan pembangunan terutama menyangkut ketenagakerjaan.

1.3 Ruang Lingkup Penulisan

Sumber data yang digunakan dalam analisis merupakan hasil Sakernas Agustus 2018. Profil Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Agustus Tahun 2018 merupakan analisis deskriptif yang dibatasi pada wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa aspek yang akan dibahas antara lain karakteristik demografi, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan pengangguran yang dirinci menurut daerah perkotaan dan perdesaan serta menurut jenis kelamin/gender.

1.4 Sistematika Penyajian

Penyajian publikasi dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika penulisan, dan istilah teknis yang terdiri dari metodologi survei dan konsep definisi yang digunakan. Bagian kedua adalah gambaran umum secara ringkas mengenai kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Agustus tahun 2018 yang dipilah berdasarkan daerah tempat tinggal maupun jenis kelamin. Bagian ketiga merupakan ringkasan dari bagian sebelumnya. Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan angka persentase yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik.

1.5 Metode Survei

1.5.1 Ruang Lingkup Survei

Sakernas Agustus 2018 dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan jumlah sampel sekitar 200.000 rumah tangga, tersebar pada 20.000 Blok Sensus (BS) di seluruh provinsi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Sampel Sakernas Agustus 2018 terdiri dari 5000 BS panel Februari dan 15.000 BS panel Agustus.

Jumlah target sampel Sakernas Agustus 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 2.400 rumah tangga, tersebar pada 240 blok sensus di seluruh kabupaten/kota baik di daerah perkotaan maupun perdesaan dengan rincian 60 BS panel Februari dan 180 BS panel Agustus. Rumah tangga korps diplomatik, rumah tangga yang tinggal di blok sensus khusus dan rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel.

1.5.2 Kerangka Sampel Survei

Kerangka sampel yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap pertama, kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap kedua dan kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap ketiga. Blok sensus dalam kerangka sampel dipilah menjadi dua kelompok, yaitu blok sensus terpilih untuk estimasi tingkat provinsi, dan blok sensus komplemen (sebagai tambahan untuk estimasi kabupaten/kota pada bulan Agustus). Mulai tahun 2017 hingga 2018, Sakernas dilaksanakan secara panel rumah tangga, hal ini berarti selama 2 (dua) tahun berturut-turut pencacah akan mendata responden yang sama. Metode ini dilakukan untuk melakukan pengamatan mendalam terhadap aktifitas dan kondisi ketenagakerjaan responden.

Kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap pertama adalah daftar wilayah pencacahan SP2010 terpilih yang disertai dengan informasi banyaknya rumah tangga hasil listing SP2010 (Daftar RBL1), muatan blok sensus dominan (pemukiman biasa, pemukiman

mewah, pemukiman kumuh), informasi daerah sulit/tidak sulit, dan klasifikasi desa/kelurahan (rural/urban).

Kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap kedua adalah daftar blok sensus pada setiap wilayah cacah terpilih. Dan kerangka sampel pemilihan tahap ketiga adalah daftar rumah tangga biasa, tidak termasuk *institutional household* (panti asuhan, barak polisi/militer, penjara, dsb) dalam setiap blok sensus sampel hasil pencacahan lengkap SP2010 (SP2010.C1) yang telah dimutakhirkan pada setiap menjelang pelaksanaan survei.

1.5.3 Rancangan Sampel

Pemilihan sampel rumah tangga dirancang dengan penarikan sampel beberapa tahap, dengan tahapan sebagai berikut:

Estimasi Kabupaten/kota

- Tahap 1: Memilih 25% blok sensus populasi secara *Probability Proportional to Size* (PPS), dengan size jumlah rumah tangga hasil SP2010 di setiap strata lapangan usaha yang sudah ditetapkan,
- Tahap 2: Memilih sejumlah n blok sensus sesuai alokasi secara *systematic* di setiap strata urban/rural per kabupaten/kota per strata lapangan pekerjaan,
- Tahap 3: Memilih sebanyak 10 rumah tangga hasil pemutakhiran secara systematic sampling.

Estimasi Provinsi

- Tahap 1: Memilih 5000 blok sensus secara *systematic sampling* dari 20.000 blok sensus estimasi kabupaten/kota sesuai alokasi dan mempertimbangkan distribusi sampel per strata di tingkat kabupaten/kota.
- Tahap 2: Memilih 10 rumah tangga hasil pemutakhiran secara systematic sampling.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Untuk pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner Sakernas Agustus 2018 yang ditujukan kepada individu diupayakan agar individu yang bersangkutan yang memberikan keterangan/jawaban.

1.5.5 Pengolahan Data

Pengolahan data, mulai dari tahap perekaman data (*data entry*), pemeriksaan konsistensi antar isian dalam kuesioner sampai dengan tahap tabulasi, sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan komputer. Sebelum tahap ini dimulai, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan awal atas kelengkapan isian daftar pertanyaan, penyuntingan (*editing*) terhadap

isian yang tidak wajar, termasuk hubungan keterkaitan (konsistensi) antara satu jawaban dengan jawaban yang lainnya.

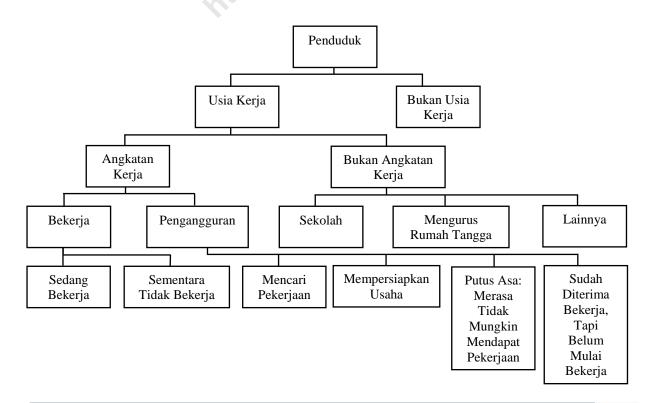
1.6 Konsep dan Definisi

Sama seperti pelaksanaan Sakernas sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan melalui Sakernas Agustus 2018 mempunyai tujuan utama menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan setiap semester. Tujuan khususnya adalah untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja, serta perkembangannya di tingkat provinsi maupun nasional.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas sejak tahun 1984 menggunakan Konsep Baku Angkatan Kerja (*Standard Labour Force Concept*) yang tertuang dalam *International Conference of Labour Statisticians* (ICLS) ke-13 tahun 1982.

Pada tahun 2013, *International Labour Organization* (ILO) menyelenggarakan ICLS ke-19 yang menghasilkan beberapa pengembangan konsep definisi variabel-variabel ketenagakerjaan, serta menyesuaikan konsep aktivitas produktif (yang dalam ICLS ke-19 disebut dengan *work*) dengan batasan produksi yang mengacu pada *System National Account* (SNA) 2008.

Konsep ICLS ke-13 membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah **Angkatan Kerja** dan **Bukan Angkatan Kerja**, seperti diagram di bawah ini:



Definisi yang berkaitan dengan penerapan konsep tersebut di Indonesia dijelaskan dalam uraian berikut:

- 1. **Penduduk usia kerja** adalah penduduk berusia 15 tahun dan lebih.
- 2. **Penduduk yang termasuk angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
- 3. **Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang seluruh waktunya atau sebagian besar waktunya digunakan untuk sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya dan tidak bekerja.
- 4. **Seseorang disebut bekerja** bila melakukan kegiatan ekonomi memproduksi barang atau jasa dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi.
- 5. **Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja** adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panenan, mogok dan sebagainya. Contoh:
 - a. Pekerja tetap, pegawai pemerintah/swasta yang sedang tidak masuk bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin/peralatan perusahaan mengalami kerusakan, dan sebagainya.
 - b. Petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya (menunggu panen atau musim hujan untuk menggarap sawah).
 - c. Pekerja profesional (mempunyai keahlian tertentu/khusus) yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pekerjaan berikutnya/pesanan dan sebagainya. Seperti dalang, tukang cukur, tukang pijat, dukun, penyanyi komersial dan sebagainya
- 6. **Penganggur terbuka**, terdiri dari:
 - a. Mereka yang mencari pekerjaan.
 - b. Mereka yang mempersiapkan usaha.
 - c. Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa).
 - d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. (lihat pada "An ILO Manual on Concepts and Methods")

- Seseorang digolongkan sebagai pencari kerja apabila pada saat survei tidak punya pekerjaan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, mereka dapat terdiri dari:
 - a. Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
 - b. Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.

Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan.

7. **Mempersiapkan suatu usaha** adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang "baru", yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila ada "tindakan nyata", seperti: mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya. Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha. Mempersiapkan suatu usaha, nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (own account worker) yaitu dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar maupun dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

Penjelasan:

Kegiatan mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih berusaha untuk mempersiapkan suatu kegiatan usaha.

- 8. **Pengangguran Terdidik** adalah rasio jumlah pencari kerja yang berpendidikan sekolah menengah ke atas yang dianggap sebagai kelompok penduduk terdidik.
- 9. **Setengah Penganggur** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah Penganggur terdiri dari:
 - **Setengah Penganggur Terpaksa** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
 - **Setengah Penganggur Sukarela** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebagian pihak menyebutkan sebagai pekerja paruh waktu/*part time worker*).

- 10. **Seseorang disebut sebagai sekolah** bila melakukan kegiatan untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. *Tidak termasuk yang sedang libur sekolah*.
- 11. **Seseorang disebut mengurus rumah tangga** bila melakukan kegiatan yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya: ibu-ibu rumah tangga dan anaknya yang membantu mengurus rumah tangga. Sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapatkan upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja.
- 12. **Seseorang disebut sebagai kegiatan lainnya** bila melakukan kegiatan selain disebut di atas, yakni mereka yang sudah pensiun, orang-orang yang cacat jasmani (buta, bisu dan sebagainya) yang tidak melakukan sesuatu pekerjaan seminggu yang lalu.
- 13. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).
- 14. **Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan** adalah jumlah jam kerja yang dilakukan oleh seseorang (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu.
 - Bagi pedagang keliling, jumlah jam kerja dihitung mulai berangkat dari rumah sampai tiba kembali di rumah dikurangi waktu yang tidak merupakan jam kerja, seperti mampir ke rumah famili/kawan dan sebagainya.
- 15. **Lapangan Pekerjaan** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja meliputi:
 - Sektor Primer terdiri dari Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian
 - Sektor Sekunder terdiri dari Sektor Industri Pengolahan, Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, dan Sektor Konstruksi
 - Sektor Tersier terdiri dari Sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Akomodasi, Sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Sektor Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Keuangan serta Sektor Jasa-Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan.
- 16. **Jenis pekerjaan/jabatan** adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja. Jenis pekerjaan pada publikasi ini, mengikuti Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI) 2014.
- 17. **Upah/gaji bersih** adalah penerimaan buruh/karyawan berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan tersebut. Penerimaan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Penerimaan bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah

- dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan sebagainya (oleh perusahaan/kantor/majikan).
- 18. **Status pekerjaan** adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Mulai tahun 2001 status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori yaitu:
 - a. **Berusaha sendiri**, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
 - b. **Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar**, adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.
 - c. **Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar**, adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
 - d. **Buruh/Karyawan/Pegawai**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.
 - e. Pekerja bebas di pertanian, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian.
 - **Majikan** adalah orang atau pihak yang memberikan pekerjaan dengan pembayaran yang disepakati.
 - f. Pekerja bebas di nonpertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.

 Usaha non pertanian meliputi: usaha di Sektor Pertambangan, Industri, Listrik, Gas dan Air, Sektor Konstruksi/Bangunan, Sektor Perdagangan, Sektor Angkutan, Pergudangan dan

- Komunikasi, Sektor Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan, Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan.
- g. **Pekerja tak dibayar** adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Pekerja tak dibayar tersebut dapat terdiri dari:
 - 1) Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri/anak yang membantu suaminya/ayahnya bekerja di sawah.
 - 2) Bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti famili yang membantu melayani penjualan di warung.
 - 3) Bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah tangga tetangganya.
- 19. **Kegiatan informal:** dalam publikasi ini, pendekatan batasan kegiatan informal diambil dari kombinasi antara jenis pekerjaan utama dan status pekerjaan. Batas kegiatan informal dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Batasan Kegiatan Informal

		Jenis Pekerjaan Utama											
Status Pekerjaan	Tena- ga Profe- sional	Tenaga Kepe- mimpi- nan	Pejabat Pelak- sana dan Tata Usaha	Tena- ga Penju- alan	Tena- ga Usaha Jasa	Tena- ga Usaha Perta- nian	Tena- ga Pro- duksi	Tena- ga Opera- sional	Peker- ja Kasar	Lain- nya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
Berusaha Sendiri	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF			
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tak Dibayar	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	INF			
Pekerja Bebas di Pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF			
Pekerja Bebas di Non Pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF			
Pekerja Tak Dibayar	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF			

Sumber: Sakernas Agustus 2018 Catatan: F = Formal INF=Informal





Penduduk Usia Kerja (PUK)

1.073.861

Angkatan kerja (AK)



727.918

Pada tahun 2018, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 727.918 penduduk bekerja dan 26.552 pengangguran



Bekerja 701.366 JOB

Pengangguran 26.552



Bukan Angkatan kerja (BAK)

345.943

Pada tahun 2018, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 345.943 orang yang termasuk bukan angkatan kerja



Sekolah 81.716



Mengurus Rumah Tangga 226.808



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

67,79%

3,65%

hitles: Illoabel Lopes. 90 ild

II. ANALISIS KETENAGAKERJAAN

Pembangunan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki daerah tersebut, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dengan menempatkan penduduk sebagai modal dasar utama dalam pembangunan, maka masalah kependudukan perlu mendapat perhatian yang lebih. Penduduk yang berkualitas baik secara jasmani maupun rohani yang memiliki kemampuan dan ketrampilan akan sangat membantu dalam pembangunan itu sendiri.

Penduduk mampu berperan sebagai motor penggerak pembangunan maupun sebagai objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan penduduk dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi sebagai tenaga kerja. Dengan melihat indikator ketenagakerjaan di suatu wilayah dapat diketahui seberapa besar penduduk yang aktif secara ekonomi sebagai pekerja, seberapa besar tingkat pengangguran dan kondisi ketenagakerjaan dari sektor ekonomi.

Keadaan ketenagakerjaan tidak terlepas dari kondisi penduduk di suatu wilayah. Jumlah penduduk khususnya komposisi penduduk sangat berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan. Pertumbuhan penduduk terutama penduduk yang masuk dalam usia kerja menjadi faktor utama dalam memengaruhi kondisi ketenagakerjaan yang ada.

Pertumbuhan penduduk usia kerja menimbulkan dampak yang sangat komplek berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan. Semakin banyak penduduk angkatan kerja mengakibatkan semakin besar sumber daya manusia yang aktif dalam kegiatan ekonomi sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan daerah. Namun apabila pertumbuhan ini tidak diikuti dengan tingginya penyerapan tenaga kerja oleh sektor lapangan pekerjaan yang tersedia maka akan mengakibatkan tingkat pengangguran yang cukup tinggi dan akan menimbulkan masalah besar yang akhirnya berdampak negatif terhadap kegiatan pembangunan itu sendiri.

Untuk itu indikator ketenagakerjaan sangat dibutuhkan untuk melihat keadaan dan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Dalam publikasi ini akan dibahas diantaranya karakteristik penduduk usia kerja, tingkat partisipasi penduduk angkatan kerja, tingkat pengangguran, produktivitas tenaga kerja dan kontribusi sektor lapangan pekerjaan terhadap penyerapan tenaga kerja.

2.1 Karakteristik Penduduk Usia Kerja

Penduduk yang termasuk dalam kategori penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja menurut kegiatannya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Angkatan Kerja (AK) dan Bukan Angkatan Kerja (BAK). Pada Agustus tahun 2018

penduduk usia kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1.073.861 orang, 66,79 persen diantaranya termasuk dalam angkatan kerja dan 33,21 persen adalah bukan angkatan kerja.

Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja dan pengangguran. Dari 66,79 persen angkatan kerja, sebanyak 96,35 persen adalah mereka yang bekerja sementara sisanya sebanyak 3,65 persen merupakan pengangguran.

96,48 96,11 96,35

3,52 3,89 3,65

Laki-Laki Perempuan Jumlah

Bekerja Pengangguran

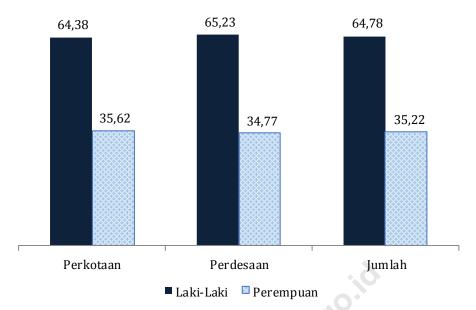
Gambar 1. Persentase Penduduk Usia Kerja yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2018

Sumber: Sakernas Agustus 2018

Dari Gambar 1 terlihat bahwa lebih dari 96 persen penduduk baik laki-laki maupun perempuan yang masuk ke dalam angkatan kerja berstatus bekerja. Hal ini menandakan bahwa di Bangka Belitung, tidak terlalu sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Rendahnya angka pengangguran baik laki-laki maupun perempuan di Kepulauan Bangka Belitung pada kondisi Agustus 2018 dapat dikarenakan faktor tingkat pendidikan atau pengalaman yang dimiliki sehingga mereka cenderung memilih pekerjaan dan menjadi pengangguran sampai ia mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kriteria dan harapan.

Namun secara keseluruhan, lapangan pekerjaan di Kepulauan Bangka Belitung masih didominasi oleh laki-laki, hal ini terlihat pada Gambar 2 dimana dimana persentase laki-laki yang bekerja sebesar 64,78 persen dan perempuan hanya sebesar 35,22 persen. Hal ini adalah wajar terjadi karena dalam budaya kita mencari pekerjaan adalah tugas laki-laki dan sebagian besar perempuan masih memilih untuk tidak bekerja serta mengurus rumah tangga.

Gambar 2. Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2018



Dilihat dari daerah tempat tinggal, terlihat bahwa persentase penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja untuk daerah perkotaan lebih rendah dibandingkan daerah perdesaan yaitu 64,79 persen dibandingkan 71,45 persen. Keadaan ini erat kaitannya dengan karakteristik wilayah di Kepulauan Bangka Belitung dimana daerah pedesaan lebih banyak menyerap tenaga kerja khususnya pada sektor primer yaitu pertanian dan pertambangan sedangkan di daerah perkotaan penyerapan tenaga kerja lebih dominan pada sektor tersier seperti sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi.

Tabel 2. Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Utama, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2018

Kegiatan Utama		Perkota	an	F	Perdesaan			Jumlah		
Regiatali Utalila	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Angkatan Kerja	81,08	47,54	64,79	87,03	53,58	71,45	83,82	50,20	67,79	
Bekerja	77,59	45,47	61,99	84,72	51,78	69,38	80,87	48,25	65,32	
Pengangguran	3,49	2,07	2,80	2,31	1,80	2,07	2,95	1,95	2,47	
<u>Bukan Angkatan</u> <u>Kerja</u>	18,92	52,46	35,21	12,97	46,42	28,55	16,18	49,80	32,21	
Sekolah	7,84	9,00	8,40	5,87	7,53	6,64	6,93	8,35	7,61	
Mengurus Rumah tangga	5,74	41,14	22,94	2,97	37,16	18,90	4,47	39,39	21,12	
Lainnya	5,34	2,32	3,87	4,13	1,73	3,01	4,78	2,06	3,48	
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber: Sakernas Agustus 2018

Tabel 2 juga menunjukkan persentase penduduk yang bekerja di wilayah perkotaan lebih rendah dibandingkan penduduk yang bekerja di perdesaan, yaitu 61,99 persen berbanding 67,38 persen. Ketika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, terlihat bahwa persentse penduduk laki-laki yang bekerja di daerah perkotaan lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki yang bekerja di daerah perdesaan, yaitu 77,59 persen berbanding 84,72 persen. Hal serupa juga terjadi pada penduduk perempuan dimana persentase penduduk perempuan yang bekerja di perkotaan (45,47 persen) lebih rendah daripada di perdesaan (51,78 persen).

Beberapa hal yang mempengaruhi keadaan tersebut antara lain yaitu karena sektor lapangan usaha yang ada di perdesaan lebih mengakomodir tenaga kerja laki-laki dan perempuan dibandingkan di perkotaan. Seperti sektor pertanian yang banyak berada di daerah perdesaan tidak memiliki peraturan jam kerja yang mengikat, serta tidak memperhatikan spesifikasi pendidikan dan keterampilan dibanding sektor-sektor lain sebagaimana yang ada di perkotaan. Selain itu juga tingkat penawaran dan peluang kerja di perdesaan terutama untuk sektor pertanian lebih banyak dibandingkan di daerah perkotaan. Sehingga penduduk baik lakilaki maupun perempuan di perdesaan memiliki peluang yang lebih besar untuk masuk dalam angkatan kerja dibandingkan penduduk di perkotaan. Sementara itu untuk daerah perkotaan, dengan semakin berkembangnya beberapa perusahaan juga mengakibatkan penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Akibatnya, persentase perempuan yang bekerja di perkotaan juga lebih tinggi daripada di perdesaan. Dengan bekal skill tertentu, perempuan dengan tingkat pendidikan yang tinggi di daerah perkotaan memiliki peluang yang besar masuk ke dunia kerja.

Penduduk usia kerja yang termasuk bukan angkatan kerja daerah perkotaan lebih banyak dibandingkan daerah perdesaan, yaitu 35,21 persen berbanding 28,55 persen. Sementara itu, lebih banyak penduduk perempuan yang berstatus mengurus rumah tangga di wilayah perdesaan dibanding perkotaan, yaitu 37,16 persen berbanding 41,14 persen. Keadaan ini juga menggambarkan penduduk laki-laki masih sangat berperan dalam kegiatan ekonomi sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga. Sedangkan perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sebagian besar masih bersifat membantu memperoleh penghasilan keluarga atau dapat disebut berstatus pekerja keluarga. Peran ganda perempuan dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor rendahnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, mereka lebih mengutamakan kedudukannya sebagai istri, sehingga waktu yang digunakan lebih banyak digunakan untuk mengurus rumah tangga.

2.1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat mengindikasikan seberapa besar penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Pada tahun 2018, TPAK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 67,79 persen artinya dari 100 penduduk yang

berusia 15 tahun ke atas terdapat 67-68 orang yang termasuk dalam angkatan kerja atau sebanyak 67-68 orang aktif secara ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

87,03 83.81 81,08 71,44 67,79 64.79 53.58 50,19 47,54 P P L+P L L L+P L L+P Perkotaan Perdesaan Jumlah

Gambar 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2018

Sumber: Sakernas Agustus 2018

Pada kondisi Agustus 2018, di Kepulauan Bangka Belitung TPAK perempuan jauh lebih rendah dibanding dengan TPAK laki-laki, yaitu 50,19 persen berbanding 83,81 persen. Pola yang sama terjadi di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Sementara itu, dilihat dari wilayahnya TPAK di wilayah perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan, yaitu 71,44 persen berbanding 64,79 persen.

Baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, TPAK antara laki-laki dan perempuan memiliki pola yang sama dimana di daerah perdesaan TPAK cenderung lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. TPAK penduduk laki-laki di perdesaan sebesar 87,03 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 81,08 persen. Adapun TPAK penduduk perempuan di perdesaan sebesar 53,58 persen sedangkan di perkotaan sebesar 47,54 persen. Secara keseluruhan, TPAK di perkotaan sebesar 64,79 persen sedangkan di perdesaan 71,44 persen. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia kerja di wilayah perdesaan yang terserap sebagai angkatan kerja lebih besar dibanding wilayah perkotaan.

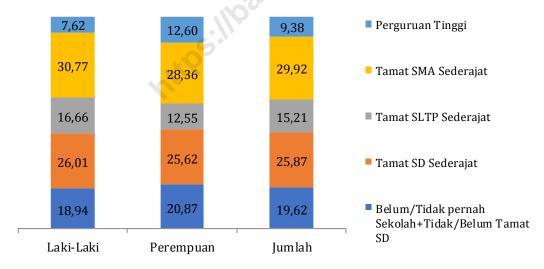
2.2 Pendidikan Pekerja

Tingkat pendidikan tenaga kerja yang rendah merupakan salah satu masalah utama kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Banyaknya lapangan pekerjaan yang membutuhkan spesifikasi pendidikan yang tinggi sementara keadaan angkatan kerja yang ada memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah atau spesifikasi jurusan pendidikan yang tidak sesuai dengan lapangan kerja yang ada menjadi salah satu faktor rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2018 di Kepulauan Bangka Belitung terdapat 45,49 persen tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan rendah yaitu tamat SD ke bawah. Dari persentase tersebut, sebesar 25,87 persen tenaga kerja di provinsi ini memiliki tingkat pendidikan tamatan SD Sederajat dan sebesar 19,62 persen belum pernah sekolah atau tidak tamat SD Sederajat. Pada waktu yang sama masih terdapat 15,21 persen penduduk yang bekerja memiliki pendidikan SMP, sehingga jika dikumulatifkan, terdapat 60,70 persen penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah.

Sementara itu, penduduk bekerja yang memiliki pendidikan SMA adalah sebesar 29, 92 persen dan hanya sebesar 9,38 persen tenaga kerja di Bangka Belitung yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi. Jika dilihat dari jenis kelaminnya, persentase tenaga kerja perempuan dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah lebih rendah dibandingkan pekerja laki-laki dengan jenjang pendidikan yang sama, yaitu sebesar 59,04 persen berbanding 61,61 persen. Namun demikian, untuk jenjang SMA ke atas persentase pekerja laki-laki justru lebih sedikit dibandingkan perempuan yaitu sebesar 38,39 persen untuk pekerja laki-laki dan sebesar 40,96 persen untuk pekerja perempuan.

Gambar 4. Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2018



Sumber: Sakernas Agustus 2018

Gambar 4 juga menggambarkan bahwa persentase tenaga kerja perempuan yang tamat perguruan tinggi lebih banyak dibanding tenaga kerja laki-laki, yaitu 12,60 persen berbanding 7,62 persen. Secara umum dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan tenaga kerja perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih baik dibandingkan tenaga kerja laki-laki. Hal ini dapat dikarenakan penduduk usia kerja laki-laki lebih memilih bekerja dibandingkan bersekolah, dan sebaliknya.

Tabel 3. Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2018

Pendidikan Tertinggi yang	I	Perkotaan	I	Perdesaan		
Ditamatkan	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Blm/tdk pernah sekolah+Tdk/blm tamat SD	8,86	10,10	9,30	29,80	32,90	30,88
Tamat SD Sederajat	19,23	17,96	18,78	33,31	34,19	33,62
Tamat SMP Sederajat	17,83	11,59	15,61	15,40	13,63	14,78
Tamat SMA Sederajat	41,93	40,06	41,26	18,74	15,27	17,53
Perguruan Tinggi	12,15	20,29	15,05	2,75	4,01	3,19
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa sebagian besar tenaga kerja di wilayah perdesaan masih berpendidikan SMP ke bawah, yaitu sebesar 64,50 persen. Sedangkan di wilayah perkotaan, jumlah tenaga kerja yang berpendidikan SMP ke bawah hanya sebesar 28,08 persen. Hal ini menunjukkan terdapat ketimpangan yang cukup jauh antara tenaga kerja di wilayah pedesaan dan perkotaan dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Dilihat dari jenis kelamin, Tabel 3 menunjukkan terdapat sebesar 67,09 persen tenaga kerja perempuan di wilayah perdesaan yang berpendidikan rendah atau dibawah SMP, sementara di perkotaan tenaga kerja dengan jenjang pendidikan yang sama hanya sebesar 28,06 persen pekerja perempuan yang berpendidikan rendah. Dilihat dari jenis kelaminnya, persentase pekerja laki-laki di perdesaan yang berpendidikan dibawah SMP masih lebih tinggi dibanding perkotaan, yaitu sebesar 63,11 persen berbanding 28,09 persen.

Tabel 3 juga menunjukkan bahwa di wilayah perkotaan hanya terdapat sebesar 15,05 persen pekerja yang berpendidikan universitas/perguruan tinggi, sedangkan di wilayah perdesaan hanya 3,19 persen pekerja yang merupakan lulusan perguruan tinggi. Dilihat dari tingkat pendidikannya, pekerja di wilayah perkotaan di dominasi oleh lulusan SMA sederajat yaitu 41,26 persen. Kondisi ini berimbang antara laki-laki dan perempuan, yaitu masing-masing sebesar 41,93 persen dan 40,06 persen. Di wilayah perdesaan, penduduk usia kerja yang bekerja juga masih didominasi oleh pekerja yang tamat Sekolah Dasar, yaitu sebesar 33,62 persen.

Secara umum, data yang ditunjukkan oleh tabel 3 menunjukkan bahwa karakteristik tenaga kerja di wilayah perdesaan masih didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah. Kondisi ini tentunya menunjukkan bahwa tenaga kerja di daerah perdesaan memiliki nilai tawar atau *bargaining power* yang cenderung lemah dibandingkan dengan pekerja di wilayah perkotaan.

2.3 Kontribusi Sektor

Analisis kegiatan ekonomi biasanya menitikberatkan pada distribusi tenaga kerja menurut sektor, perubahan struktur perekonomian terutama dari sektor pertanian ke sektor sekunder atau tersier, dan penyebab perpindahan tersebut serta implikasinya. Perubahan atau pergeseran struktur tenaga kerja yaitu dari sektor primer ke sektor sekunder atau sektor primer ke sektor tersier merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan. Dimana keberhasilan pembangunan juga terkait dengan kecepatan pertumbuhan sektor sekunder yang dianggap sebagai gambaran mengenai produktivitas tenaga kerja.

Komposisi tenaga kerja menggambarkan perbandingan jumlah tenaga kerja di suatu sektor tertentu terhadap seluruh tenaga kerja. Pada Agustus 2018 secara umum sektor tersier masih menjadi sektor penyokong utama dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain sektor primer.

Gambar 5. Distribusi Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Pekerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017-2018



Sumber: Sakernas Agustus 2017 - 2018

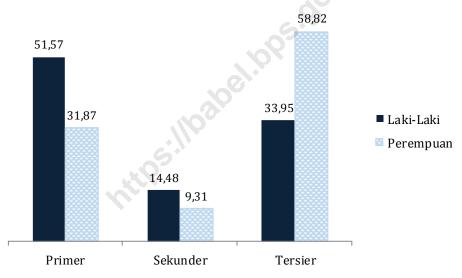
Dalam Sakernas penyerapan tenaga kerja terbagi atas 3 sektor, yaitu sektor primer, sekunder dan tersier. Sektor primer terdiri dari lapangan pekerjaan pertanian dan pertambangan. Sektor Sekunder yaitu terdiri dari lapangan pekerjaan Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air serta lapangan pekerjaan Konstruksi/Bangunan. Sedangkan sektor Tersier yaitu meliputi lapangan pekerjaan Perdagangan, Hotel, Restoran dan Akomodasi, lapangan pekerjaan Angkutan, Pergudangan dan Telekomunikasi, lapangan pekerjaan Keuangan dan Jasa Perusahan serta lapangan pekerjaan Jasa Kemasyarakatan.

Gambar 5 memperlihatkan bahwa pada tahun 2018 sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penyerapan tenaga kerja di Kepulauan Bangka Belitung adalah sektor primer yaitu sebesar 44,63 persen. Kondisi tersebut berbeda dengan tahun 2017 dimana kontribusi terbesar terhadap penyerapan tenaga kerja ada pada sektor tersier yaitu sebesar 41,86 persen.

Pada tahun 2018, penyerapan tenaga kerja pada sektor primer mengalami peningkatan sebesar 12,07 poin persen dibandingkan tahun 2017. Sektor terbesar kedua dalam penyerapan tenaga kerja di tahun 2018 adalah sektor tersier yaitu sebesar 42,71 persen, sementara sektor sekunder menyerap 12,66 persen dari total angkatan kerja. Penyerapan tenaga kerja pada sektor tersier mengalami peningkatan sebesar 0,85 poin persen sementara sektor sekunder mengalami penurunan sebesar 12,92 poin persen dibandingkan tahun 2017.

Adanya perubahan komposisi pekerja pada tiga sektor di atas secara tidak langsung merupakan efek dari rendahnya harga hasil komoditas pertanian, seperti lada, karet, dan sawit, sehingga ikut mempengaruhi industri pengolahan dan perdagangan. Rendahnya harga komoditas pertanian menyebabkan sebagian pekerja sektor pertanian, industri, dan perdagangan beralih ke sektor pertambangan.

Gambar 6. Kontribusi Sektor Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2018



Sumber: Sakernas Agustus 2018

Gambar 6 menunjukkan persentase tenaga kerja laki-laki lebih banyak bekerja di sektor primer dan sekunder dibanding tenaga kerja perempuan (51,57 persen berbanding 31,87 persen dan 14,48 persen berbanding 9,31 persen), sementara pada sektor tersier proporsi tenaga kerja perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki yaitu 58,52 persen berbanding 33,95 persen. Hal ini dapat disebabkan karena faktor sifat dan jenis kegiatan di masing-masing sektor. Sektor primer dan sekunder memiliki sifat dan jenis aktivitas yang relatif membutuhkan tenaga dan jam kerja lebih banyak dibandingkan sektor tersier. Hal ini menyebabkan tenaga kerja perempuan akan cenderung untuk lebih memilih pekerjaan yang tidak banyak menyita tenaga dan waktu karena masih harus mengurus rumah tangga, yaitu pekerjaan pada sektor tersier.

Tabel 4. Distribusi Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2018

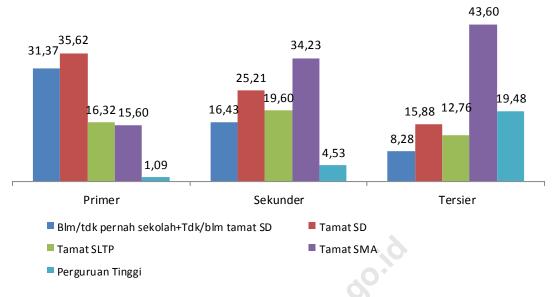
Lapangan		Perkotaar	1	Perdesaan			
Pekerjaan	L	P	L+P	L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Sektor Primer	29,70	8,77	22,24	75,13	57,70	69,07	
Sektor Sekunder	19,84	11,92	17,02	8,70	6,39	7,90	
Sektor Tersier	50,46	79,31	60,74	16,17	35,91	23,03	
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Berdasarkan tabel 4 di atas, di daerah perkotaan sektor tersier menyerap lebih banyak tenaga kerja perempuan dibandingkan tenaga kerja laki-laki, yaitu sebesar 79,31 persen berbanding 50,46 persen. Sedangkan di daerah perdesaan penyerapan tenaga kerja laki-laki lebih dominan pada sektor primer yaitu sebesar 75,13 persen dan perempuan hanya sebesar 57,70 persen. Kondisi ini sejalan dengan analisa sebelumnya, dimana penyerapan tenaga kerja terbesar di wilayah perkotaan pada tahun 2018, berada pada sektor tersier, sedangkan penyerapan tenaga kerja terbesar di wilayah perdesaan berada pada sektor primer.

Hasil di atas juga sesuai dengan kondisi riil yang terjadi di lapangan, dimana ketersediaan lapangan kerja di wilayah perkotaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih banyak berada pada sektor tersier yang meliputi sektor perdagangan, hotel, restoran dan akomodasi, sektor angkutan, pergudangan dan telekomunikasi, serta sektor jasa perusahaan dan jasa kemasyarakatan. Sedangkan di daerah perdesaan lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan pada sektor primer yang meliputi sektor pertanian dan pertambangan.

Gambar 7 memperlihatkan kontribusi sektor dalam penyerapan tenaga kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Dari gambar terlihat bahwa sektor primer masih didominasi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 66,99 persen (tidak tamat SD sebesar 31,37 persen dan tamat SD sebesar 35,62 persen). Hal berbeda terlihat pada sektor sekunder dan tersier, dimana kedua sektor tersebut didominasi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan SMA, yaitu masing-masing sebesar 34,23 persen dan 43,60 persen. Pada sektor tersier, tingkat pendidikan pekerja selain didominasi oleh pekerja lulusan SMA sederajat juga terdapat cukup banyaknya pekerja dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi, yaitu sebesar 19,48 persen.

Gambar 7. Distribusi Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Sektor dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2018



Data di atas sejalan dengan kondisi di lapangan dimana lapangan pekerjaan pada sektor tersier yang cenderung membutuhkan tingkat pendidikan dan *skill* yang lebih tinggi. Kondisi ini menggambarkan bahwa struktur pekerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di sektor primer didominasi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan rendah dan pada sektor tersier sebagian besar pekerjanya telah memiliki tingkat pendidikan tinggi.

2.4 Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan

Berdasarkan status pekerjaannya, tenaga kerja terbagi menjadi dua sektor, yaitu sektor formal dan informal. Tenaga kerja pada sektor formal adalah tenaga kerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan dan tenaga kerja dengan status sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Sedangkan tenaga kerja pada sektor informal adalah tenaga kerja dengan status sebagai berusaha dibantu buruh tidak di bayar, berusaha sendiri, pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar.

Dilihat dari Tabel 5 tentang status pekerjaan, penduduk yang bekerja di lapangan kerja formal sebesar 50,12 persen dan penduduk bekerja di lapangan kerja informal sebesar 49,88 persen. Di sektor formal persentase pekerja yang berstatus buruh atau karyawan sebesar 43,34 persen dan untuk pekerja yang berusaha dibantu dengan buruh tetap/buruh dibayar sebesar 6,78 persen.

Tabel 5. Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2018

Chabus]	Perkotaa	n	I	Perdesaan			Jumlah		
Status	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Formal	64,35	59,00	62,45	42,00	26,65	36,67	53,59	43,74	50,12	
1. Buruh/karyawan	54,93	55,32	55,08	33,87	24,28	30,54	44,79	40,68	43,34	
2. Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	9,42	3,68	7,37	8,13	2,37	6,13	8,80	3,06	6,78	
Informal	35,65	41,00	37,55	58,00	73,35	63,33	46,41	56,26	49,88	
1. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tdk dibayar	7,43	7,15	7,33	18,00	9,65	15,09	12,52	8,33	11,04	
2. Berusaha sendiri	20,56	19,59	20,21	25,12	17,45	22,45	22,75	18,58	21,28	
3. Pekerja Bebas	4,89	2,79	4,14	10,58	12,19	11,14	7,63	7,22	7,49	
4. Pekerja tidak dibayar	2,77	11,47	5,87	4,30	34,06	14,65	3,51	22,13	10,07	
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Pada umumnya tenaga kerja pada sektor formal memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan para pekerja pada sektor informal. Selain itu pekerja pada sektor informal biasanya juga tidak memiliki keterampilan khusus. Pada Agustus 2018, persentase tertinggi untuk sektor informal dimiliki oleh pekerja dengan status berusaha sendiri yaitu sebesar 21,28 persen, sementara itu pekerja tak dibayar sebesar 10,07 persen, pekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebesar 11,04 persen, dan pekerja bebas sebesar 7,49 persen.

Dilihat dari jenis kelaminnya, pada sektor formal pekerja perempuan dan laki-laki lebih banyak bekerja dengan status buruh/karyawan dengan persentase masing-masing sebesar 44,79 persen dan 40,68 persen. Sedangkan pada sektor informal, pekerja laki-laki lebih banyak bekerja dengan status sebagai berusaha sendiri yaitu sebesar 22,75 persen. Sedangkan penduduk perempuan lebih banyak bekerja dengan status sebagai pekerja tidak dibayar atau sebagai pekerja keluarga yaitu sebesar 22,17 persen.

Sementara itu, pekerja di wilayah perkotaan lebih banyak yang bekerja di sektor formal dibanding informal yaitu sebesar 62,45 persen berbanding 37,55 persen. Sebaliknya, pekerja di wilayah perdesaan lebih banyak yang bekerja di sektor informal dibanding sektor formal yaitu 63,33 persen berbanding 36,67 persen.

2.5 Pengangguran

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam bidang ekonomi adalah rendahnya tingkat pengangguran. Semakin rendah tingkat pengangguran maka dapat dikatakan kegiatan ekonomi di suatu daerah semakin maju, sekaligus merupakan tanda keberhasilan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduknya. Namun demikian, interpretasi terkait angka pengangguran juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti indikator tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan, kualitas pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya.

Untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan mengenai pengangguran dapat menggunakan indikator tingkat pengangguran terbuka, tingkat pengangguran terdidik, dan tingkat pengangguran terselubung atau setengah pengangguran.

2.5.1 Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Pada Agustus 2018, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,65 persen. Artinya dari 100 orang penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terdapat sekitar 3 sampai 4 orang yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan.

4,30 4,35 4,32 3,89 3,65 3,52 3,36 2,90 2.66 K D K+D K D K+D K D K+D Laki-Laki Perempuan **Iumlah**

Gambar 8. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2018

Sumber: Sakernas Agustus 2018

Dari Gambar 8 terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara tingkat pengangguran terbuka di wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan, yaitu berturutturut sebesar 3,52 persen dan 3,89 persen. Secara logis rendahnya tingkat pengangguran di

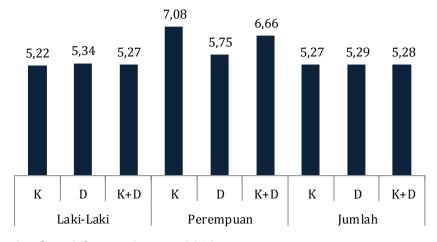
wilayah perkotaan merupakan salah satu efek banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di perdesaan. Namun demikian, untuk kondisi Agustus 2018, tingginya tingkat pengangguran di daerah perdesaan dapat terjadi sebagai imbas rendahnya harga komoditas pertanian seperti karet, lada dan sawit, sehingga pada titik tertentu penduduk yang biasanya bekerja menjadi tidak bekerja.

Jika dilihat dari jenis kelamin, tingkat pengangguran perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu sebesar 2,90 persen berbanding 4,32 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa kontribusi perempuan cukup baik dalam pasar tenaga kerja. Salah satu yang mungkin menjadi penyebabnya adalah karena perempuan lebih giat dalam bekerja sehingga mayoritas pemberi kerja akan lebih memilih pekerja perempuan dibandingkan laki-laki.

2.5.2 Pengangguran Terdidik

Tingkat pengangguran terdidik adalah rasio jumlah pencari kerja yang berpendidikan sekolah menengah ke atas yang dianggap sebagai kelompok penduduk terdidik terhadap jumlah angkatan kerja di kelompok tersebut. Pengangguran terdidik merupakan kekurangselarasan antara perencanaan pembangunan pendidikan dengan perkembangan lapangan kerja. Di sisi lain, para pengangguran terdidik biasanya lebih selektif dalam memilih pekerjaan dan mereka mempunyai kemauan bekerja di tempat yang langsung menempatkan mereka di posisi yang baik, dengan fasilitas dan gaji/tunjangan yang sesuai.

Gambar 9. Tingkat Pengangguran Terdidik Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2018



Sumber: Sakernas Agustus 2018

Tingkat pengangguran terdidik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5,28 persen. Hampir tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pengangguran terdidik di daerah perkotaan dengan perdesaan, yaitu masing-masing 5,27 persen dan 5,29 persen. Keadaan ini menunjukkan penduduk pencari kerja yang berpendidikan sekolah menengah ke atas di daerah perkotaan hampir berimbang dengan di daerah perdesaan.

Tingkat pengangguran terdidik laki-laki sebesar 5,27 persen dan lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran terdidik perempuan sebesar 6,66 persen. Dilihat dari segi wilayahnya, tingkat pengangguran terdidik perempuan di wilayah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan, yaitu 7,08 persen berbanding 5,75 persen. Sebaliknya, tingkat pengangguran terdidik laki-laki di wilayah perkotaan lebih rendah dibanding daerah perdesaan yaitu 5,22 persen berbanding 5,34 persen.

2.5.3 Setengah Pengangguran

Indikator ketenagakerjaan lainnya adalah tingkat setengah pengangguran. Tingkat setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja dengan jam kerja kurang dari jam kerja normal atau kurang dari 35 jam selama seminggu. Persentase setengah pengangguran secara kasar dapat dijadikan sebagai indikator untuk melihat seberapa besar produktivitas pekerja. Proporsi jumlah penduduk setengah pengangguran bermanfaat untuk dijadikan acuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan, dan produktivitas pekerja.

Tabel 6. Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2018

Jumlah Jam Kerja	Jenis K	Iumlah	
Seminggu	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
< 35 jam	24,40	42,00	30,60
≥35 jam*	75,60	58,00	69,40
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas Agustus 2018

Keterangan: *) Termasuk sementara tidak bekerja

Tabel 6 memperlihatkan persentase jumlah pekerja yang termasuk dalam setengah pengangguran pada tahun 2018 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terdapat sebesar 30,60 persen tenaga kerja yang ada di Kepulauan Bangka Belitung termasuk dalam kategori setengah pengangguran. Dengan pengertian lain bahwa ada sebesar 30,60 persen dari total pekerja pada

Agustus 2018 adalah tenaga kerja yang bekerja dibawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam selama seminggu yang lalu. Sedangkan untuk tenaga kerja yang bekerja dengan jam kerja normal atau 35 jam atau lebih sebesar 69,40 persen.

Sementara itu dilihat dari jenis kelamin, pekerja laki-laki lebih produktif dibandingkan pekerja perempuan dimana pekerja perempuan yang bekerja dibawah jam kerja normal lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, yaitu sebesar 42,00 persen sementara pekerja laki-laki yang bekerja dibawah jam kerja normal hanya sebesar 24,40 persen. Ini menunjukkan bahwa memang secara alamiah, laki-laki yang bertanggung jawab sebagai pencari nafkah akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dengan semaksimal mungkin dalam bekerja.



RINGKASAN



AGUSTUS 2018

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUN

TPAK MENURUT JENIS KELAMIN



83,31%



51,19%

TPT MENURUT JENIS KELAMIN



4,32%



2,90%

PENDIDIKAN PEKERJA

TIDAK/BELUM

19,62%

SD

25,87%

SMP

15,21%

SMA

29,92%

PERGURUAN

29,92%

TINGGI

9,38%

JENIS KELAMIN PEKERJA



64,78%



35.22%

LAPANGAN PEKERJAAN

PRIN

PRIMER 44,63%

TERSIER

42,71%

12,66%

SEKUNDER

STATUS PEKERJAAN

6 REDUSAHA SENDID

BERUSAHA SENDIRI 21,28%

BERUSAHA DIBANTU BURUH DIBAYAR

6,78%

BERUSAHADIBANTU
BURUH TIDAK DIBAYAR

11,04%

7,49%

43.34%

PEKERJA KELUARGA

10,07%

SETENGAH PENGANGGURAN

🐧 < 35 JAM DALAM SEMINGGU 30,60%

🏚 ≥ 35 JAM DALAM SEMINGGU* **69,40%**

Keterangan: *) Termasuk sementara tidak bekerja

TINGKAT PENGANGGURAN TERDIDIK

8)

9

5,27%



5,29%

PENDUDUK USIA KERJA

2% PENGANGGURAN

8% SEKOLAH

21% MENGURUS RUMAH
TANGGA

hitles: Illoabel Lopes. 90 ild

III. RINGKASAN

Berdasarkan ulasan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terpilah berdasarkan karakteristik maupun wilayah administrasinya bisa disimpulkan bahwa:

- 1. Tahun 2018 persentase penduduk usia kerja di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 66,79 persen penduduk merupakan angkatan kerja, dengan rincian sebesar 96,35 persen diantaranya bekerja dan sisanya 3,65 persen merupakan pengangguran. Persentase penduduk yang bekerja apabila dilihat menurut gender, persentase penduduk laki-laki yang bekerja lebih tinggi dibanding penduduk perempuan.
- 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencapai 67,79 persen, dimana tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (50,19 persen) lebih rendah dibandingkan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki (83,81 persen).
- 3. Tingkat pendidikan tenaga kerja masih relatif rendah, sebanyak 45,49 persen tenaga kerja yang ada adalah berpendidikan SD Sederajat ke bawah, 15,21 persen berpendidikan tamat SMP Sederajat, 29,92 persen berpendidikan tamat SMA Sederajat dan 9,38 persen berpendidikan tamat perguruan tinggi.
- 4. Sektor lapangan pekerjaan yang memberikan kontribusi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja secara berturut-turut adalah sektor primer sebesar 44,63 persen, sektor tersier sebesar 42,71 persen dan sektor sekunder sebesar 12,66 persen.
- 5. Tenaga kerja laki-laki lebih banyak bekerja di sektor primer dan sekunder dibandingkan tenaga kerja perempuan perempuan (51,57 persen berbanding 31,87 persen dan 14,48 persen berbanding 9,31 persen). Sebaliknya, pada sektor tersier proporsi tenaga kerja perempuan lebih banyak dibanding tenaga kerja laki-laki (58,82 persen berbanding 33,95 persen).
- 6. Tenaga kerja di wilayah perkotaan paling banyak terserap pada sektor tersier yaitu sebesar 60,74 persen sedangkan di wilayah perdesaan lebih terlihat pada sektor primer sebesar 69,07 persen.
- 7. Sektor primer masih didominasi oleh pekerja yang berpendidikan rendah, yaitu sebesar 66,99 persen (Tidak tamat SD sebesar 31,37 persen dan Tamat SD sebesar 35,62 persen). Hal berbeda terlihat pada sektor sekunder dan tersier dimana kedua sektor tersebut didominasi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan SMA, yaitu masingmasing sebesar 34,23 persen dan 43,60 persen.
- 8. Proporsi tenaga kerja dengan status pekerja formal yaitu sebesar 50,12 persen, hampir sama dengan pekerja informal yaitu sebesar 49,88 persen. Tenaga kerja perempuan yang bekerja sebagai buruh/karyawan sebesar 40,68 persen, lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki yang sebesar 44,79 persen.

- 9. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,65 persen, dimana ada sedikit perbedaan antara TPT di wilayah perkotaan dibandingkan perdesaan, yaitu berturut-turut sebesar 3,52 persen dan 3,89 persen. Sementara itu, TPT perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, yaitu sebesar 2,90 persen berbanding 4,32 persen.
- 10. Tingkat pengangguran terdidik sebesar 5,28 persen dimana tingkat pengangguran terdidik di daerah perdesaan (5,29 persen) hampir sama dengan daerah perkotaan (5,27 persen) dan tingkat pengangguran terdidik perempuan (6,66 persen) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (5,27 persen).
- 11. Tenaga kerja yang termasuk dalam setengah pengangguran sebesar 30,60 persen. Pekerja perempuan yang bekerja dibawah jam kerja normal (42,00 persen) lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja laki-laki (24,40 persen).

nites: Ilbabel lops of id



DATA MENCERDASKAN BANGSA



Email: bps1900@bps.go.id
Website: http://www.babel.bps.go.id